

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TERBUKA  
NOMOR : 461 /H31.1.13/KEP/2008

tentang

PENUNJUKAN MODERATOR, PENYAJI DAN PESERTA SEMINAR AKADEMIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TERBUKA (FISIP-UT)

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TERBUKA

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah melakukan penulisan karya ilmiah dan penelitian;
  - b. bahwa sehubungan dengan butir a, perlu dilakukan diseminasi atas karya ilmiah dan hasil penelitian;
  - c. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dipandang perlu menunjuk Moderator, Penyaji dan Peserta Seminar Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka (FISIP-UT)

- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999
  - c. Keputusan Presiden Republik Indonesia
    - 1. Nomor 41 Tahun 1984;
    - 2. Nomor 10 Tahun 1991;
    - 3. Nomor 58/M/Tahun 2005.
  - d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
    - 1. Nomor 0564/U/1991;
    - 2. Nomor 0470/O/1992;
    - 3. Nomor 0168/O/1995.
  - e. Keputusan Rektor Universitas Terbuka
    - 1. Nomor : 090/J31/KEP/2002
    - 2. Nomor : 140/J31/KEP/2002
    - 3. Nomor : 3005/J31/KEP/2006



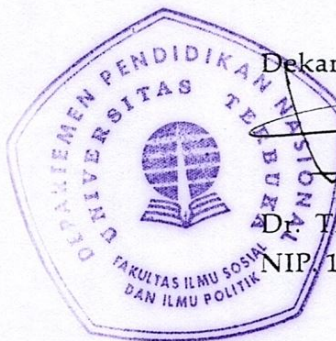
## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

- Pertama : Moderator, Penyaji dan Peserta Seminar Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Moderator, Penyaji dan Peserta Seminar dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Moderator adalah:
1. membuka seminar;
  2. memimpin seminar;
  3. menutup seminar.
- Ketiga : Tugas Penyaji adalah:
1. menyampaikan materi sesuai dengan topik yang telah ditentukan;
  2. menjawab semua pertanyaan yang diajukan peserta;
  3. menerima masukan yang bersifat teknis penulisan atau hal-hal lainnya sesuai dengan kaidah akademik.
- Keempat : Biaya pelaksanaan seminar akademik dibebankan pada anggaran FISIP-UT.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 April 2008



Dekan FISIP-UT,

Dr. Tri Darmayanti, MA.

NIP. 131866177



6(1)11

Lampiran Keputusan Dekan FISIP-UT

Nomor : 461 /H31.1.13/KEP/2008

Tanggal : 9 April 2008

DAFTAR NAMA MODERATOR, PENYAJI, DAN  
PESERTA SEMINAR AKADEMIK FISIP-UT

No	N a m a	N I P	Judul Makalah	Keterangan
1.	Meita Istianda	131652013	Nilai-nilai Demokrasi Dalam Pemerintahan Marga	Penyaji
2.	Ace Sriati Rachman	132002052	Gender Horrography: Kekerasan terhadap Perempuan Dalam Pemberitaan Pers.	Penyaji
3.	Boedhi Oetoyo	131600148	Pelajar, Internet, dan Situs Dewasa (Studi Kasus)	Penyaji
4.	Enceng	1320522020	-	Moderator
5.	Zainul Ittihad Amin	131466578	-	Peserta
6.	Tri Darmayanti	131866177	-	Peserta
7.	Murni Rachmatini	100002915	-	Peserta
8.	Agus Santosa	131600863	-	Peserta
9.	Darmanto	131602651	-	Peserta
10.	Rosa Tosaini	131125848	-	Peserta
11.	Liestyodono B.	131568783	-	Peserta
12.	Lilik Aslichati	131600148	-	Peserta
13.	Tiesnawati	131644062	-	Peserta
14.	Arifah Bintarti	131879645	-	Peserta
15.	Suryarama	131483767	-	Peserta
16.	Daryono	131866185	-	Peserta
17.	Siti Era Mardiani	131629049	-	Peserta
18.	Agus Riyanto	131835798	-	Peserta
19.	Ayi Karyana	132002053	-	Peserta
20.	Djoko Rahardjo	132061162	-	Peserta
21.	H.I. Bambang Prasetyo	132231722	-	Peserta
22.	Setyo Kuncoro	132231723	-	Peserta
23.	Agus Priyanto	132255812	-	Peserta
24.	Made Yudhi Setiani	132205571	-	Peserta



## **Nilai-nilai Demokrasi dalam Pemerintahan Marga**

**Meita Istianda**

### **Pendahuluan**

Saat ini Indonesia dikenal sebagai negara yang berhasil menerapkan konsep demokrasi dalam menjalankan pemerintahan. Mengutip berita dari Voice of Indonesia, disebutkan bahwa Indonesia mendapatkan penghargaan dan apresiasi yang tinggi akan hasil-hasil demokrasi yang selama ini dijalankan dari masyarakat dunia. Hal tersebut tercermin dalam pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri Komunitas Demokrasi yang diselenggarakan di Krakow, Polandia. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia digambarkan pihak penyelenggara sebagai “champion of democracies” dan diwakili oleh Menteri Luar Negeri, R.M. Marty M. Natalegawa mendapatkan kehormatan menjadi panelis mewakili kawasan Asia pada pertemuan tingkat Menteri maupun pada konferensi pers pertemuan dimaksud (<http://id.voi.co.id/berita-indonesia/politik/4790-menlu-ri-dunia-hargai-demokrasi-di-indonesia.html>.) Berdasarkan berita tersebut memang nyata Indonesia telah berhasil menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam pemerintahannya. Namun ada hal yang menggelitik untuk dipertanyakan, benarkah nilai-nilai demokrasi yang selama ini banyak diketahui oleh masyarakat umum merupakan nilai atau konsep yang hanya dimiliki atau berasal dari dunia Barat?

Makalah ini hendak menyajikan fakta lain seputar nilai-nilai demokrasi yang sebenarnya juga telah ada dalam sistem pemerintahan masyarakat Indonesia, di antaranya masyarakat asli yang berada di wilayah Sumatera Selatan. Masyarakat ini memiliki sistem pemerintahan yang dikenal dengan sebutan sistem pemerintahan Marga.

### **Sistem Pemerintahan Marga**

Sistem pemerintahan Marga merupakan sistem pemerintahan tradisional yang telah lama ada di wilayah Sumatera Selatan. Sistem ini sudah ada sejak abad ke-18 yang terbentuk di bawah kekuasaan kerajaan Palembang. Berlian (2003) menyebutkan keberadaan pemerintahan Marga baru dapat ditelusuri pada tahun 1825 ke-atas, setelah keruntuhan Kesultanan Palembang, dan dari cuplikan-cuplikan karangan Ambtenaar Belanda. Mengenai pembentukannya, berdasar hasil pemikiran van Royen diketahui ada beberapa tahap. Tahap pertama: berasal dari orang Kubu. Orang Kubu, hidup berkelompok dan hidup dari penghasilan hutan, berburu dan menangkap ikan. Mereka ini mengembara menelusuri pinggiran sungai guna memenuhi kebutuhan hidup. Mereka mengembara tanpa mempunyai tempat tinggal yang tetap dan hidup diikat tali kekeluargaan. Tipe kelompok inilah yang dianggap sebagai asal mula kesatuan-kesatuan geneologis yang merupakan benih pertama terbentuknya masyarakat hukum yang bersifat



geneologis yang berkembang menjadi geneologis nasional. Tahap kedua: pada tahap ini, satuan-satuan masyarakat nomaden tadi sudah memiliki keinginan hidup menetap dengan mencari nafkah bertani. Kelompok-kelompok yang menetap inilah yang dianggap mendirikan dusun-dusun secara permanen dengan ikatan tali kekeluargaan yang merasa berasal dari satu “*puyang*” tertentu. Tahap ketiga: dari cara bertalang berpindah-pindah, timbullah dusun-dusun permanen. Biasanya tiap-tiap rumpun tadi menghuni suatu daerah yang memiliki batas-batas wilayah alami misalnya sungai, lembah atau gunung. Tiap-tiap dusun itu masih merupakan suatu jurai keturunan yang tergambar dari adat-istiadatnya. Tahap keempat: terjadinya perkembangan rumpun-rumpun akibat anggota rumpun tadi berkembang. Bagian dari rumpun asal tadi pindah lokasi membuat rumpun baru baik berjarak dekat ataupun jauh, akan tetapi masih dalam kesatuan daerah secara geografis. Biasanya hubungan mereka belum terputus, kecuali sangat jauh jaraknya sehingga terputus hubungannya yang berakibat hidup sendiri-sendiri dalam rumpun dengan membuat dusun-dusun baru tempat hidup menetap. Disinilah mulai berkembangnya kesatuan-kesatuan masyarakat geneologis teritorial. Tahap kelima: tahap ini sudah terjadi percampuran dari beberapa rumpun keluarga yang menempati suatu wilayah tertentu yang masing-masing tetap merupakan kesatuan mandiri dan merasa seketurunan dari nenek moyang lain, tanpa ada percampuran di antara rumpun-rumpun tadi. Akibatnya lama-kelamaan garis keturunan dari puyang yang berbeda menjadi kabur dan lebih menonjol sifat teritorial dari satu kesatuan masyarakat. Untuk mengkoordinir rumpun-rumpun yang secara teritori telah menyebar diperlukan suatu pengelolaan yang kuat dan kokoh. Pengelolaan tersebut tidak dapat dicapai hanya dengan konsep berupa satu kesatuan masyarakat adat saja. Namun diperlukan suatu sistem untuk mengaturnya, sehingga pada akhirnya mereka memiliki lembaga sendiri, perangkat hukum, dan acuan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat secara mandiri. Kebutuhan untuk mengatur ‘Marga’ dapat dikatakan awal timbulnya suatu sistem pemerintahan Marga.

Berkenaan dengan pemerintahan Marga ini, Soewito dkk., (1999) mengatakan bahwa pemerintahan Marga merupakan pemerintahan asli masyarakat Sumatera Selatan. Pemerintahan ini mengatur dirinya berdasarkan adat dan hukum adat, serta mempunyai wilayah tertentu. Pemerintahan Marga merupakan persekutuan hukum adat yang homogen berdasarkan ikatan teritorial dan geneologis. Ismail (2004) menyatakan Marga merupakan nama dari kesatuan masyarakat hukum yang berasaskan teritorial dan merupakan persekutuan daerah. Dilihat dari bentuk pemerintahannya, Marga merupakan komunitas asli atau biasa disebut masyarakat adat yang memiliki fungsi sebagai *self governing community*, yaitu sebuah komunitas sosio-kultural yang bisa mengatur diri sendiri (Truman, 2008). Sebagai entitas *self-governing community*,



Marga mempunyai seperangkat aturan adat untuk mengelola hubungan sosial; seperti adat hak waris, pernikahan, gotong-royong, penyelesaian konflik antarwarga adat, nilai-nilai penghargaan etnis pendatang, tata cara menjaga wilayah tanah kedaulatan masyarakat adat, pembagian sumberdaya ekonomi secara komunal dan adil serta pengaturan sistem pemerintahan lokal secara otonom.

Pemerintahan Marga (Truman, 2008) dapat dipahami sebagai: 1) Marga adalah masyarakat hukum, berfungsi sebagai kesatuan wilayah pemerintahan terdepan di tingkat lokal; 2) Marga berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat; 3) Susunan pemerintahan Marga ditentukan oleh hukum adat melalui konstitusi Simbur Tjahaja; 4) Pemerintah Marga didampingi Dewan Marga membuat peraturan dalam rangka kewenangan menurut hukum adat; 5) Pemerintah Marga dapat menetapkan sanksi atas peraturan. Dari uraian tersebut, dapat dipahami tentang Marga sebagai sebuah sistem pemerintahan, tetapi di manakah letak dari nilai-nilai demokrasi. Sebelum dibahas tentang nilai-nilai demokrasi pada pemerintahan Marga, akan diuraikan konsep demokrasi secara umum.

### **Demokrasi**

Hampir semua masyarakat dunia yang menganut sistem demokrasi dalam negaranya mengetahui makna demokrasi. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*. (Pengertian Demokrasi, <http://sakauhendro.wordpress.com/demokrasi-dan-politik/pengertian-demokrasi/>). Henry B. Mayo dalam Budiardjo (1997) merumuskan nilai-nilai demokrasi, yaitu :

1. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
2. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Karena itu pergantian pimpinan secara keturunan atau mengangkat diri sendiri melalui kudeta dianggap tidak wajar.
3. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. (mengutamakan diskusi-diskusi terbuka dan kreatif)
4. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman.



## 5. Menjamin tegaknya keadilan.

Selain apa yang telah dirumuskan oleh Henry B. Mayo, nilai-nilai demokrasi juga dicirikan oleh pemerintahan yang menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat banyak.
2. Pelaksanaan kedaulatan rakyat diwakilkan kepada beberapa orang yang mewakilkannya.
3. Adanya lembaga perwakilan rakyat yang mencerminkan kehendak rakyat.
4. Adanya pemilihan umum yang bebas dan rahasia
5. Pengakuan partisipasi rakyat di dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat.
6. pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

Demikian pembahasan tentang demokrasi yang intinya dapat dikatakan dalam demokrasi pemilik kekuasaan adalah rakyat yang diberikan melalui wakil-wakilnya. Kemudian berkaitan dengan pemerintahan Marga, di manakah letak dari nilai-nilai atau ciri-ciri dari demokrasi tersebut.

### **Nilai-nilai demokrasi dalam Pemerintahan Marga**

Konsep demokrasi pada masyarakat Marga bersifat tradisional, di mana wibawa kepemimpinan ditimbulkan oleh hubungan yang berasal dari kekerabatan, dan saling ketergantungan secara ekonomi dan sosial. Demokrasi masyarakat Marga secara politik merupakan sebuah sistem, di mana pemimpin mewakili keinginan rakyat yang dipilih melalui suara rakyat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan. Sistem demokrasinya menjamin kebebasan dan persamaan bagi rakyat seluas mungkin, dan tidak ada oposisi. Pimpinan Marga dijalankan secara kolektif bersama-sama anggota dewan Marga. Jika ada hal-hal yang kurang disetujui oleh warga, maka protes atau usul disampaikan melalui rapat warga, untuk kemudian diteruskan ke dewan marga yang disampaikan oleh Kerio sebagai wakil dari warga dalam Dewan Marga.

Demokrasi masyarakat Marga juga dicerminkan oleh pemilihan pemimpin dan cara-cara pemimpin mengelola pemerintahannya. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimanakah struktur pemerintahan, sistem pemilihan dan kepemimpinan masyarakat Marga.

Dilihat dari struktur pemerintahan ditemukan bahwa:

- a. Pemerintahan dipimpin oleh seorang jurai tua yang dipilih dari jurai tua lainnya. Jurai tua yang terpilih menjadi Kepala Marga yang disebut Pesirah.



- b. Kepala Marga dalam menjalani kekuasaan didampingi oleh musyawarah jurai tua yang disebut sebagai Dewan Marga
- c. Anggota Dewan Marga terdiri dari mereka yang telah menjabat secara fungsional dalam Marga berdasarkan hasil pemilihan
- d. Segala keputusan baik mengenai adat, pelanggaran adat perizinan yang menyangkut penggunaan tanah, air dan segala isi yang terkandung di dalamnya diputuskan bersama oleh masyarakat yang diwakili dalam Dewan Marga.
- e. Kepala Marga adalah kepala pemerintahan/kepala adat dan ketua Raad Marga (Pengadilan Marga).
- f. Di bidang agama, di lingkungan Marga ada penghulu Marga, di tingkat dusun ada Khotib dusun, Khotib Dusun dan Penghulu Marga bertugas mencatat kelahiran, kematian, kawin, cerai, dan rujuk. Penghulu di bawah koordinasi Pasirah Kepala Marga sedang Khotib di bawah koordinasi Kepala Dusun (Krio).

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa Pesirah merupakan pemimpin dari suatu badan eksekutif yang mengatur dan melaksanakan pemerintahan Marga sehari-hari. Seorang Pesirah biasanya dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk asli. Kerap kali seorang Pesirah dipilih bukan karena tinggi pendidikannya, tetapi karena usia dan kebijaksanaannya dan pengetahuannya terhadap tata adat yang berlaku. Oleh karena itu seorang Kepala Marga atau kepala dusun saja tetapi adalah sebagai bapak bagi semua penduduk dusun atau marga. Ikatan batin kepala marga/kepala dusun sangat erat sekali.

#### Sistem Pemilihan

Kepala Marga dan juga krio perowatin masing-masing dipilih secara langsung oleh rakyat Marga. Calon Kepala Marga bersaing secara ketat di antara para wakil (Jurai Tua) dari setiap ragam kekerabatan. Pada umumnya mereka yang terpilih adalah:

- a. Mereka yang mempunyai rumpun kekerabatan yang lebih luas.
- b. Mutu personalnya seperti pengetahuan tentang adat, kesediaan dan kreatifitasnya untuk mengambil suatu keputusan yang bertanggung jawab.

Berikut ini adalah contoh sistem pemilihan pemimpin pada masyarakat Marga:

- Pemilihan Pamong Marga, dilakukan secara demokratis oleh warga marga.
- Sistem Pemilihan bersifat terbuka dengan cara: menempatkan lambang dari masing-masing calon (pohon pisang, ubi kayu, dll.) Rakyat pemilih berdiri berbaris menghadap lambang,



kemudian dihitung satu per satu berapa jumlah marga yang berdiri di hadapan masing-masing lambang, barisan yang terpanjang dianggap memenangkan pemilihan.

- Kepala Marga dalam melaksanakan tugasnya (terutama untuk mengambil suatu keputusan) dibantu oleh Dewan Marga.

Dari uraian tadi, terlihat jelas bahwa pemilihan Kepala Marga dilakukan secara demokratis (demokrasi terbuka).

#### Tugas dan Wewenang Kepala Marga dan Perangkatnya

Kepala Marga bersama Dewan Marga bertugas dan berwenang:

##### a. melaksanakan pemerintahan umum (eksekutif)

- Melaksanakan pemerintahan umum seperti pemeliharaan jalan, jembatan yang menghubungkan dusun dan antarmarga, membina dan mengurus pendidikan rakyat, dan mengangkat guru-guru desa.
- Memelihara dan memberdayakan harta kekayaan dusun/marga seperti pemberian izin menggarap tanah atau hutan marga oleh warganya.
- Menjaga ketertiban umum
- Mengawasi kesehatan masyarakat terutama ketika ada perkembangan penyakit menular
- Memelihara kas marga.
- 

##### b. membuat peraturan dan perundangan marga (legislatif)

- Membuat aturan-aturan tentang gaji guru sekolah desa
- Membuat aturan tentang penggarapan tanah baik sawah maupun penggarapan hutan marga
- Menetapkan bea atau sewa bumi dalam kekayaan marga
- Membuat anggaran pendapatan dan belanja marga

##### c. mengadili perkara pelanggaran baik yang berupa perdata adat maupun pidana adat (peradilan).

- Mengadili sengketa perdata adat antarwarga
- Menetapkan hukuman terhadap tindak perdata adat maupun pidana adat
- Menetapkan aturan-aturan adat yang akan diberlakukan kepada warga sesuai dengan perkembangannya.

Sebagaimana telah dijelaskan, marga dipimpin oleh seorang Pesirah sebagai Kepala Marga dan Kepala Adat. Pesirah dibantu dan didampingi oleh suatu dewan yang disebut Raad Marga.



Raad Marga diketuai oleh Pesirah dengan anggotanya seluruh Kerio dalam Marga itu ditambah dengan beberapa pemuka masyarakat dalam marga. Dalam praktiknya Raad Marga, selain mempunyai kekuasaan mengadili, juga mempunyai kewenangan untuk membuat kebijaksanaan dan aturan-aturan sepanjang belum atau tidak diatur oleh pemerintahan yang lebih tinggi, dapat ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Marga. Semua keputusan rapat Marga dilaporkan dan diketahui oleh pejabat yang lebih tinggi. Demikian pula halnya suatu sengketa antarwarga atau antardusun dalam suatu Marga atau telah terjadi suatu pelanggaran adat diselesaikan melalui "rapat marga".

Dengan demikian maka rapat Marga dengan Pesirah sebagai ketuanya mempunyai kewenangan/kekuasaan eksekutif, legislatif, dan kehakiman. Hal inilah tampaknya yang membuat efektifnya pemerintahan Marga dan besarnya wibawa seorang Pesirah.

Nilai-nilai demokrasi dalam pemerintahan Marga antara lain tercermin dalam :

- a. masyarakat berhak memilih pemimpin mereka sendiri dan rela tunduk kepadanya.
- b. hak persekutuan atas tanah masih berada di tangan masyarakat di mana para anggotanya dapat menggunakannya.
- c. masyarakat dapat menyuarakan suara hati nurani mereka melalui musyawarah yang dimanifestasikan dalam bentuk Dewan Marga.
- d. Dewan Marga memiliki wewenang legislatif, eksekutif, dan kehakiman. Namun, kekuasaan dan kewenangan dibatasi dengan berbagai peraturan (aturan adat dan UU yaitu UU Simboer Tjahaja).

Simboer Tjahaja ialah nama sistem adat sekaligus undang-undang yang pernah berlaku efektif dalam masyarakat Sumsel selama ratusan tahun. Fakta ini telah diungkap De Roo Faille pada abad ke-16 dalam buku *Dari Zaman Kesultanan Palembang*. Dalam kedudukannya sebagai "pedoman hukum" yang bersifat normatif, kitab adat itu menjadi grand narrative yang menilai, mematok, dan memandu arah perkembangan masyarakat. Karena sifatnya yang terbuka, isi kitab itu berkembang mengikuti perubahan sosial dan perkembangan masyarakat Sumsel (Berlian, 2003).

Bila dikaitkan dengan nilai-nilai demokrasi, di dalam Undang-undang Simboer Tjahaja telah termaktub nilai demokrasi yang diatur dalam Bab ke-2. Berikut ini isi dari undang-undang tersebut.

#### Undang-Undang Simboer Tjahaja Bab Ka-Doewa

Atoeran Marga

Fatsal 1



- Di dalam satoe-satoe marga ditetapkan satoe pasirah jang merentah atas segala hal marganja dan pasirah itoe orang banjak jang milih dan Radja jang angkat serta kasih nama.

#### Fatsal 2

- Di bawaa pasirah ditetapkan satoe penggawa marga kedoedoekannja di atas segala pengandang karena dia jang merentah marga waktoe pasirah berdjalan atau lain-lain.

#### Fatsal 3

- Di dalam doesoen pasirah ditetapkan satoe lebe penghoeloe jang koeasa hoekoem serta chetib jang toeloeng atas pekerjaan lebe penghoeloe.

#### Fatsal 4

- Tiada boleh pasirah angkat atau berentiken proatin, penggawa dan kaoem.

#### Fatsal 5

- Djika proatin, penggawa atau kaoem akan berganti sebab mati atau lain-lain hal hendaklah orang banjak oendjoek pantjang jang patoet djadi gantinja dan pasirah membawa orang itoe menghadap jang berkoeasa soepaja dipilih dan diangkat.

Dari pasal-pasal Undang-undang Simboer Tjahaja tersebut terlihat jelas bahwa masyarakat Marga memang telah menerapkan nilai-nilai demokrasi dan memiliki aturan (UU) yang jelas dalam mengelola pemerintahannya. Seperti, dinyatakan dalam pasal 1 bahwa Pesirah dipilih oleh orang banyak, atau pasal 4 adanya prinsip keseimbangan yaitu Pesirah tidak memiliki kekuasaan untuk mengangkat atau memberhentikan prowatin, penggawa dan kaum. Pasal 5, untuk mengadakan penggantian harus mendengarkan masukan dari banyak orang. Dengan demikian bukankah pemilihan atas dasar suara terbanyak, kekuasaan yang dibatasi, dan harus mendengarkan masukan dari banyak orang merupakan prinsip-prinsip demokrasi yang dianut di masyarakat kita sekarang? Jadi, sebenarnya baik nilai maupun prinsip demokrasi telah ada pada masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Marga di Sumatera Selatan.

#### Penutup

Konsep demokrasi Marga bersifat tradisional, di mana wibawa ditimbulkan oleh hubungan yang berasal dari kekerabatan, saling bergantung secara ekonomi dan sosial. Demokrasi masyarakat Marga tercermin dari sistem pemilihan pemimpin, di mana pemimpin dipilih melalui



suara terbanyak. Kemudian mereka menjamin kebebasan dan persamaan bagi rakyat seluas mungkin. Pimpinan Marga dijalankan secara kolektif bersama-sama anggota dewan Marga.

Dari pola demokrasi masyarakat Marga terdapat hal-hal yang sama dengan pola demokrasi Barat dan ada pula yang berbeda. Pola yang sama adalah yang bersifat universal antara lain:

- a. Ada jaminan (hak) hidup, dengan tersedianya tanah serta kebebasan menggunakannya.
- b. Adanya hak milik pribadi yang diakui dan dilindungi oleh adat
- c. Adanya kebebasan untuk memilih dan dipilih.
- d. Adanya kebersamaan hak untuk menggunakan tanah milik bersama.

Pola yang berbeda adalah:

- a. Kemerdekaan individu dibatasi oleh kepentingan bersama (rakyat).
- b. Pemerintah dipimpin secara kolektif

Selain itu, gagasan demokrasi yang berkembang dalam masyarakat Marga tidak menonjolkan kompetisi, kebebasan, partisipasi dan keterbukaan sebagaimana demokrasi Barat. Melainkan menekankan pada aspek keseimbangan dan harmoni hubungan sosial, komunalisme, kesetaraan, solidaritas sosial dan kebaikan bersama. Hal ini bisa dilihat dari berbagai macam keputusan di tingkat Marga yang selalu diputuskan secara kolektif. Sehingga memungkinkan partisipasi masyarakat secara luas dan menghindari terjadinya oligarki elite dalam pengambilan keputusan di tingkat Marga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Berlian, Saudi (2003). *Ogan Komering dalam Lintasan Sejarah*. Kayu Agung: Pemkab Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Budiardjo, Mirriam (1997). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Ismail, Arlan. (2004). *Marga di Bumi Sriwijaya*. Palembang: Unanti Press
- Soewito, Marwoto dkk. (1999). *Sistem Pemerintahan Desa Adat di Indonesia*. Bandung: Penerbit STPDN
- Truman, Harry (2008). *Good Governance Dalam Sistem Pemerintahan Marga Di Sumatera Selatan*. Diakses pada tanggal 17 Mei 2008 dari <http://adetaris.multiply.com/journal/item/6rejanglebong.blogspot.com/2008/03/governance-dalam-sistem-marga.html>
- <http://id.voi.co.id/berita-indonesia/politik/4790-menlu-ri-dunia-hargai-demokrasi-di-indonesia.html>
- <http://sakauhendro.wordpress.com/demokrasi-dan-politik/pengertian-demokrasi/>